

# PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA

## 1. PROFIL INOVASI

### 1.1 Nama Inovasi

Maitua

### 1.2 Tahapan Inovasi

penerapan

### 1.3 Inisiator Inovasi Daerah

asn

### 1.4 Jenis Inovasi

digital

### 1.5 Bentuk Inovasi Daerah

inovasi pelayanan publik

### 1.7 Urusan Inovasi Daerah

Statistik

### 1.8 Waktu Uji Coba

2023-09-19

### 1.9 Waktu Penerapan

2023-12-04

### 1.10 Rancang Bangun dan Pokok Perubahan yang Dilakukan

#### 1. DASAR HUKUM

1. UNDANG-UNDANG NOMOR NOMOR 14 TAHUN 2008 KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
2. UNDANG-UNDANG NOMOR NOMOR 19 TAHUN 2016 INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
3. UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
4. PERATURAN PRESIDEN NOMOR 39 TAHUN 2019 TENTANG SATU DATA INDONESIA;
5. PERATURAN PRESIDEN NOMOR 95 TAHUN 2018 TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (LEMBARAN NEGARA TAHUN 2018 NOMOR 182);
6. PERATURAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PER CEPATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN SATU PETA PADA. TINGKAT KETELITIAN PETA SKALA 1:50.000 (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 28);

7. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 61 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 99, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5149) ;
8. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 51 TAHUN 1999 TENTANG PENYELEGGARAAN STATISTIK (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR TAHUN 1999 NOMOR 96, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3854) ;
9. PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 59 TAHUN 2020 TENTANG PEMANTAUAN DAN EVALUASI SISTEM PEMERINTAH BERBASIS ELEKTRONIK (LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA PROVINSI PAPUA TAHUN 2017 NOMOR 4);
10. PERATURAN BUPATI MIMIKA NOMOR 23 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK KABUPATEN MIMIKA

## 1. PERMASALAHAN

### 1. Permasalahan Makro

Sebelum adanya integrasi data, Kabupaten Mimika menghadapi sejumlah kendala besar dalam pengelolaan datanya. Kendala-kendala ini secara umum dapat dikategorikan sebagai berikut:

2. Kualitas Data: Data yang ada seringkali tidak akurat, tidak konsisten, dan tidak up-to-date. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti duplikasi data, data usang, dan kurangnya standar dalam pengumpulan data.
3. Aksesibilitas Data: Akses terhadap data sangat terbatas dan terfragmentasi. Data disimpan secara terpisah di berbagai departemen, sehingga sulit untuk diakses dan diintegrasikan.
4. Teknologi dan Infrastruktur: Kabupaten Mimika belum memiliki teknologi dan infrastruktur yang memadai untuk mendukung pengelolaan data yang efektif. Sistem informasi yang ada seringkali tidak kompatibel satu sama lain.
5. Sumber Daya Manusia: Kurangnya tenaga ahli di bidang manajemen data dan teknologi informasi menjadi kendala dalam pengelolaan dan integrasi data.
6. Kebijakan dan Regulasi: Ketiadaan kebijakan dan regulasi yang jelas mengenai pengelolaan data juga menjadi penghambat dalam proses integrasi data.

Akibat dari permasalahan-permasalahan di atas, Kabupaten Mimika mengalami kesulitan dalam:

1. Pengambilan Keputusan: Ketidakakuratan dan ketidaklengkapan data menghambat pengambilan keputusan yang tepat dan efektif.
2. Pengembangan Infrastruktur: Keterbatasan data geospasial menghambat pengembangan infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
3. Pelayanan Publik: Masyarakat kesulitan mengakses informasi dan layanan publik karena kurangnya data yang tersedia.

## 1. Permasalahan Mikro

Integrasi satu data di Kabupaten Mimika masih menghadapi beberapa tantangan. Berikut adalah ringkasan permasalahan mikro tersebut:

2. **Kurangnya Kesadaran dan Pemahaman:** Banyak pihak yang belum memahami manfaat dan pentingnya integrasi satu data. Selain itu, kurangnya pengetahuan tentang tata kelola data dan standar data yang berlaku, serta koordinasi dan kolaborasi antar instansi terkait dalam pengelolaan data juga menjadi permasalahan.
3. **Keterbatasan Infrastruktur dan Sumber Daya:** Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang belum memadai, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang terampil dalam pengelolaan data, dan anggaran yang terbatas untuk mendukung kegiatan integrasi satu data menjadi penghambat integrasi satu data di Kabupaten Mimika.
4. **Ketidaksesuaian Data:** Data yang dimiliki oleh instansi yang berbeda seringkali tidak konsisten, tidak kompatibel, dan memiliki kualitas yang buruk. Selain itu, standar data yang digunakan oleh instansi yang berbeda juga seringkali tidak seragam.
5. **Ketidakamanan Data:** Keamanan data yang dimiliki oleh instansi yang berbeda seringkali tidak memadai, kontrol akses yang lemah, dan risiko kebocoran data yang tinggi menjadi permasalahan terkait keamanan data dalam integrasi satu data di Kabupaten Mimika.
6. **Budaya Berbagi Data yang Lemah:** Budaya berbagi data antar instansi yang masih lemah, keengganan instansi untuk berbagi data karena khawatir akan persaingan atau kehilangan kontrol atas data, serta kurangnya mekanisme dan insentif untuk mendorong berbagi data menjadi tantangan tersendiri dalam integrasi satu data di Kabupaten Mimika.

## 1. ISU STRATEGIS

### 2. GLOBAL

Secara keseluruhan, mencapai integrasi data global memerlukan pendekatan multi-faceted yang mengatasi tantangan teknis, hukum, dan politik. Kolaborasi, inovasi, dan komitmen terhadap tata kelola data yang bertanggung jawab adalah kunci keberhasilan. Berikut beberapa poin penting tantangan isu global :

- **Standarisasi:** Menciptakan format data, definisi, dan metode pengumpulan universal di seluruh perbedaan geografis dan budaya yang luas merupakan rintangan utama.
- **Kepemilikan dan Privasi Data:** Menyeimbangkan kebutuhan untuk berbagi data terbuka dengan masalah keamanan nasional, hak kekayaan intelektual, dan privasi individu merupakan hal yang rumit.
- **Kesenjangan Infrastruktur dan Teknologi:** Kesenjangan digital antara negara maju dan berkembang menciptakan tantangan dalam aksesibilitas data, penyimpanan, dan kemampuan pemrosesan.
- **Tata Kelola dan Regulasi:** Membangun kerangka kerja internasional untuk tata kelola data, termasuk protokol keamanan data dan kontrol akses, membutuhkan kerja sama global.
- **Keberlanjutan:** Mempertahankan komitmen jangka panjang terhadap upaya integrasi data dan memastikan sumber daya yang dibutuhkan untuk pemeliharaan dan pembaruan berkelanjutan

## 1. NASIONAL

Integrasi satu data di Indonesia merupakan langkah krusial dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan transparan. Namun, upaya ini dihadapkan pada beberapa tantangan signifikan:

- Ketidakesesuaian Data
- Keterbatasan Infrastruktur dan Sumber Daya
- Kurangnya Kesadaran dan Pemahaman
- Ketidakamanan Data
- Budaya Berbagi Data yang Lemah

## 1. LOKAL

Kabupaten Mimika, sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Papua, memiliki sejumlah tantangan unik dalam mewujudkan integrasi satu data. Tantangan-tantangan ini perlu dipertimbangkan secara serius untuk memastikan keberhasilan program integrasi data.

**Berikut adalah ringkasan isu strategis yang dihadapi Kabupaten Mimika:**

### 2. Keterbatasan Infrastruktur dan Sumber Daya:

- Akses Internet
- SDM
- Anggaran

### 3. Ketidakesesuaian Data dan Standar:

- Data Tidak Konsisten.
- Standar Data Beragam
- Data Tidak Lengkap

### 4. Kurangnya Kesadaran dan Pemahaman:

- Pemahaman Rendah
- Keterbatasan Pengetahuan
- Koordinasi Antar Instansi Lemah

### 5. Ketidakamanan Data:

- Risiko Kebocoran Data
- Ketidakpatuhan terhadap Regulasi
- Kesadaran Keamanan Siber Rendah

### 6. Budaya Berbagi Data yang Lemah:

- Keengganan Berbagi Data
- Kurangnya Insentif
- Kepercayaan Rendah Antar Instansi

**Implikasi dari isu-isu di atas:**

- Kualitas Data Rendah
- Efisiensi Rendah
- Transparansi Rendah
- **Risiko Kebocoran Data**

## 1. METODE PEMBAHARUAN

### 1. KONDISI SEBELUM ADANYA INOVASI

Sebagai gambaran kondisi sebelum adanya inovasi adalah sebagai berikut:

- Data pemerintah tersebar di berbagai instansi, sulit diakses dan tidak terintegrasi.

- Masyarakat dan pemangku kepentingan mengalami kesulitan dalam mengakses informasi yang diperlukan.
- Informasi yang tersedia terbatas, sehingga transparansi pemerintah rendah.
- Pengumpulan dan pengelolaan data manual mengakibatkan inefisiensi dan redundansi.
- Pengambilan keputusan seringkali tidak didukung oleh data yang akurat dan terpercaya.
- Pengelolaan data manual memerlukan biaya operasional yang tinggi untuk dokumentasi dan distribusi.

## 1. KONSISI SETELAH ADANYA INOVASI

- Data pemerintah dari berbagai instansi terintegrasi dalam satu platform, memudahkan akses dan pengelolaan.
- Masyarakat dan pemangku kepentingan dapat dengan mudah mengakses informasi yang mereka butuhkan secara online.
- Informasi lebih terbuka dan transparan, meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.
- Proses pengumpulan dan pengelolaan data menjadi lebih efisien dengan sistem digital.
- Keputusan yang diambil oleh pemerintah lebih akurat karena didukung oleh data yang terpercaya.
- Pengelolaan data digital mengurangi biaya operasional yang sebelumnya tinggi akibat pengelolaan manual.

## 1. KEUNGGULAN/KEBAHARUAN?)

Keunggulan dan keunikan inovasi Mimika Integrasi Satu data ( Maitua ) ini adalah:

- Kemudahan Akses Data
- Keterpaduan Informasi
- Efisiensi dan Transparansi

- Pengambilan Keputusan Berbasis Data
- Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
- Dukungan terhadap Partisipasi Publik
- Pengurangan Biaya Operasional
- Peningkatan Akuntabilitas
- Adaptasi terhadap Teknologi Modern
- Pembangunan Berkelanjutan

## 1. CARA KERJA INOVASI

Tahapan dan bisnis proses layanan Maitua (Mimika Integrasi Satu data ) adalah sebagai berikut:

2. Masyarakat mengunjungi website <https://satudata.mimikakab.go.id/>
3. Masyarakat menggunakan fitur pencarian untuk menemukan data yang dibutuhkan berdasarkan sektor (kesehatan, pendidikan, dll).
4. Data yang tersedia dapat diakses dan diunduh dalam format yang disediakan.
5. Masyarakat dapat memberikan feedback dan saran melalui fitur yang tersedia di portal.
6. Data digunakan untuk berbagai keperluan

### 1.11 Tujuan Inovasi Daerah

Tujuan dari inovasi Maitua (Mimika Integrasi Satu Data ) ini adalah:

- Meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang integrasi satu data melalui sosialisasi dan edukasi kepada semua pihak.
- Memperkuat infrastruktur TIK dan meningkatkan kapasitas SDM untuk pengelolaan data.
- Membangun standar data yang seragam dan konsisten di seluruh instansi.
- Meningkatkan kualitas data dengan melakukan pembersihan dan pemadanan data.
- Memperkuat keamanan data dengan menerapkan kebijakan dan prosedur yang ketat.
- Membangun budaya berbagi data melalui sosialisasi dan pemberian insentif.
- Mengembangkan sistem integrasi satu data yang terintegrasi dan mudah digunakan.
- Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan integrasi satu data secara berkala.

Dengan mengatasi permasalahan mikro ini, integrasi satu data di Kabupaten Mimika dapat mewujudkan berbagai manfaat, seperti:

- Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.
- Meningkatkan kualitas pelayanan publik.
- Mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data.
- Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah.

Integrasi Satu Data merupakan langkah penting untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan transparan di Kabupaten Mimika. Dengan komitmen dan kerjasama dari semua pihak, permasalahan mikro ini dapat diatasi dan integrasi satu data dapat diwujudkan dengan sukses.

### 1.12 Manfaat yang Diperoleh

Beberapa manfaat dari penerapan inovasi Maitua adalah sebagai berikut:

1. Akses Informasi yang Lebih Mudah dan Cepat
2. Pengelolaan Data yang Terpadu
3. Peningkatan Efisiensi Kerja Pemerintah
4. Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah
5. Pengambilan Keputusan yang Lebih Tepat dan Berbasis Data
6. Peningkatan Pelayanan Publik
7. Dukungan terhadap Inovasi dan Pembangunan Berkelanjutan
8. Peningkatan Partisipasi dan Keterlibatan Masyarakat
9. Penghematan Biaya Operasional
10. Adaptasi terhadap Perkembangan Teknologi Digital

### 1.13 Hasil Inovasi

Dampak inovasi ini adalah:

#### 1. **Peningkatan Transparansi Pemerintah:**

Memberikan akses terbuka terhadap data pemerintah, meningkatkan kepercayaan masyarakat.

#### 2. **Efisiensi dalam Pengelolaan Data:**

Mengurangi redundansi dan inefisiensi dalam pengumpulan dan penyimpanan data.

#### 3. **Pengambilan Keputusan yang Lebih Baik:**

Data yang akurat mendukung pembuatan kebijakan yang lebih tepat sasaran.

#### 4. **Peningkatan Partisipasi Publik:**

Memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses pemerintahan melalui akses informasi yang lebih mudah.

#### 5. **Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik:**

Data yang terintegrasi membantu pemerintah merespons kebutuhan masyarakat dengan lebih cepat dan tepat.

#### 6. **Penghematan Biaya Operasional:**

Mengurangi biaya yang terkait dengan pengelolaan dan distribusi data secara manual.

### 7. Penguatan Akuntabilitas Pemerintah:

Meningkatkan akuntabilitas dengan menyediakan data yang dapat diakses dan diaudit oleh publik.

### 8. Mendukung Pembangunan Berkelanjutan:

Data yang lengkap dan terintegrasi membantu dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program pembangunan yang berkelanjutan.

### 9. Adaptasi terhadap Teknologi Modern:

Meningkatkan kapasitas pemerintah dalam menggunakan teknologi digital untuk pelayanan publik.

### 10. Kolaborasi Antar Instansi yang Lebih Baik:

Memfasilitasi kerjasama antar berbagai instansi pemerintah melalui data yang terintegrasi.

No	Indikator	Informasi	Data Pendukung
1	Regulasi Inovasi Daerah*	Peraturan Kepala Daerah/ Peraturan Daerah	• <b>Tentang</b> PENETAPAN INOVASI DAERAH
2	Ketersediaan SDM terhadap inovasi daerah*	1-10 SDM	• <b>Tentang</b> PEMBENTUKAN TIM KERJA AKSI PERUBAHAN OPTIMALISASI PENGELOLAAN DATA STATISTIK SEKTORAL MELALUI APLIKLASI BERBASIS WEBSITE MIMIKA INTEGRASI SATU DATA (MAITUA)
3	Dukungan anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T1 dan T-2	
4	Bimtek inovasi	Dalam 2 tahun terakhir pernah 2 kali bimtek (bimtek, training dan TOT)	